

**DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN
NASIONAL INDONESIA**

Kartika Aulia
krtk737@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah lama dipersepsikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, kerugian negara akibat dugaan korupsi sepanjang tahun 2024 mencapai angka fantastis, yaitu Rp310,61 triliun . Angka ini hanyalah puncak gunung es dari dampak yang jauh lebih besar terhadap proses pembangunan nasional. Di tengah upaya pemerintah mencapai target Indonesia Emas 2045, korupsi menjadi hambatan sistemik yang menggerogoti fondasi kemajuan bangsa.

Rumusan masalah dalam esai ini adalah: bagaimana dampak korupsi terhadap berbagai dimensi pembangunan nasional di Indonesia, serta mengapa korupsi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh korupsi terhadap pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sosial dan hukum.

Tesis utama yang akan dibahas adalah bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan kebocoran anggaran, tetapi juga menciptakan inefisiensi, menurunkan kualitas layanan publik, memperlebar ketimpangan sosial, dan pada akhirnya menggagalkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Utama

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup perbuatan merugikan keuangan negara, suap, penggelapan, dan pemerasan. Pembangunan Nasional diartikan sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

2.2. Teori Pendukung

Untuk menganalisis dampak korupsi, esai ini menggunakan beberapa teori. Pertama, teori "*Grease the Wheels*" vs "*Sand the Wheels*" yang diperkenalkan oleh Méon & Sekkat (2005). Teori ini menyatakan bahwa dalam birokrasi yang lamban, korupsi kadang dianggap bisa "melumasi" roda perekonomian, namun dalam jangka panjang, korupsi justru "memasir" roda tersebut dan menghambat pertumbuhan. Kedua, teori *Keuangan Publik* dari Musgrave yang menekankan bahwa negara memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Korupsi mengganggu ketiga fungsi ini: anggaran tidak teralokasi dengan baik, distribusi pendapatan timpang, dan stabilitas ekonomi terganggu. (Julianda et al., 2025)

2.3. Penelitian Relevan

Penelitian oleh Mahardika Harilinawan (2026) berjudul "Pengaruh Korupsi dan Utang Luar Negeri terhadap Kemiskinan di Indonesia" menemukan bahwa korupsi berdampak langsung pada tersendatnya manfaat anggaran bagi masyarakat miskin. Dana pembangunan yang bocor menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak efektif. Studi lain oleh Akbar dkk. (2025) tentang "Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah" menunjukkan bahwa korupsi di daerah dapat menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kualitas infrastruktur, serta mengurangi minat investor. Penelitian oleh Idianto dkk. (2025) juga mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional

sangat rentan korupsi, dengan laporan ICW mencatat kenaikan kasus hingga 50% di sektor transportasi .

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1. Analisis Bagian Pertama

Korupsi menciptakan inefisiensi ekonomi yang signifikan. Dalam penelitian Adlansyah Kahfi Adam (2025), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara dengan persepsi korupsi tinggi cenderung sulit menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) karena investor menganggap iklim usaha tidak pasti dan biaya tinggi akibat suap .

Di sektor infrastruktur, dampaknya lebih konkret. Korupsi dalam proyek-proyek strategis nasional, seperti yang dibahas oleh Idianto dkk. (2025), tidak hanya merugikan negara secara materiil (kerugian mencapai miliaran rupiah), tetapi juga menurunkan kualitas hasil pembangunan. Praktik mark-up anggaran dan penggunaan material di bawah spesifikasi menyebabkan infrastruktur cepat rusak dan tidak aman. Hal ini pada akhirnya meningkatkan biaya perawatan dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat .

3.2. Analisis Bagian Kedua

Dampak paling kejam dari korupsi adalah ketika ia menyentuh sektor pelayanan dasar manusia. Di sektor pendidikan, kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dianalisis Silaban & Trisna (2025) menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang menggagalkan tujuan pemerataan pendidikan tinggi. Dana yang seharusnya membantu mahasiswa kurang mampu justru dikorupsi, sehingga hak atas pendidikan terenggut . Lebih luas lagi, korupsi anggaran pendidikan, seperti kasus proyek *Smart Class* senilai Rp49 miliar di Nusa Tenggara Barat,

menunjukkan adanya penggelembungan anggaran yang merugikan kualitas fasilitas belajar siswa .

Di sektor kesehatan, dampaknya bisa berujung pada kematian. Julius Habibi (2026) dalam opininya mengungkapkan bahwa korupsi menyebabkan puskesmas kekurangan alat, vaksin tidak tersedia, dan stok oksigen habis. Ketika anggaran kesehatan bocor, target nasional seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi atau penurunan *stunting* sulit tercapai. Korupsi di sini secara langsung membunuh harapan dan nyawa .

3.3. Analisis Bagian Ketiga

Dari aspek sosial, korupsi adalah pemicu disintegrasi bangsa. Penelitian dari Universitas Simalungun (2025) menegaskan bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam. Kesenjangan antara si kaya (hasil korupsi) dan si miskin (yang tidak menikmati hasil pembangunan) memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal. Nepotisme dalam pemerintahan juga memicu konflik internal karena ketidakadilan dalam distribusi jabatan atau proyek .

Dari aspek hukum, korupsi telah menjangkiti para penegak hukum itu sendiri. Kaleidoskop Hukumonline (2025) mencatat bahwa di tahun 2025, hampir seluruh lini penegak hukum—dari hakim, jaksa, advokat, hingga polisi—terjerat kasus korupsi. Kasus suap hakim Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah bukti nyata rusaknya pilar keadilan. Ketika lembaga yang seharusnya memberantas korupsi justru terkorupsi, maka kepercayaan publik terhadap negara runtuh, dan upaya pembangunan nasional kehilangan legitimasinya .

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan nasional Indonesia bersifat multidimensional dan sistemik. Korupsi menjawab rumusan masalah dengan cara sebagai berikut:

1. Di bidang ekonomi dan infrastruktur, korupsi menghambat investasi, menurunkan kualitas pertumbuhan, dan menghasilkan infrastruktur yang rentan serta tidak efisien.
2. Di bidang pendidikan dan kesehatan, korupsi menggagalkan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia dengan merampas hak masyarakat atas layanan dasar yang berkualitas.

3. Di bidang sosial dan hukum, korupsi memperlebar jurang ketimpangan, memicu disintegrasi sosial, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Temuan utama esai ini menegaskan bahwa korupsi adalah *enabler of failure* yang membuat agenda pembangunan nasional berjalan di tempat atau bahkan mundur. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya penguatan tidak hanya pada aspek penindakan (hukum), tetapi juga pada aspek pencegahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga anti-korupsi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif mengenai korelasi antara Indeks Persepsi Korupsi di suatu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., Putri, D. P., & Sapitri, N. (2025). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kajian Literatur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Layak, P. (2026). Pekerjaan Layak dan. *17 Mutiara Pembangunan Berkelanjutan- Interpretasi Bebas Tujuan SDGs dalam Berkehidupan*, 153.
- Saraswati, R., & Cahyaningtyas, I. (2026). Reconstruction of corruption prevention in national strategic projects: preventive and repressive approaches by the attorney general's office. *Clio. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (11), 1718-1772.
- Julianda, A., Fauzi, R. A., & Hafizah, D. (2025). *Jurnal Risalah Kenotariatan*. 6(1).
- Silaban, R. A. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K)(Studi Putusan Nomor: 81/Pid. Sus-Tpk/2024/Pn Mdn).